

**PERSEPSI PEMILIH TERHADAP PERAN KIP ACEH SELATAN
DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK
(Studi Kasus Pilkada Aceh Selatan 2018)**

Disusun Oleh:

**RAZIUL IKRAMA
NIM. 170801054**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2020**

**PERSEPSI PEMILIH TERHADAP PERAN KIP ACEH SELATAN
DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK
(Studi Kasus Pilkada Aceh Selatan 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Program S1- Dalam Ilmu Politik

Oleh:

**RAZIUL IKRAMA
NIM. 170801054**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc
NIDN. 2008048903

**PERSEPSI PEMILIH TERHADAP PERAN KIP ACEH SELATAN
DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK
(Studi Kasus Pilkada Aceh Selatan 2018)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Beban Salah Satu Beban Studi Program S1- Dalam Ilmu Politik

Pada hari / Tanggal

Senin, 3 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Eka Srimulvani, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001

Sekretaris,



Danil Akbar Tagwadin, B.IAM, M.Sc
NIDN. 2008048903

Penguji I,



Eka Januar, M.Soc. Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji II,



Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raziul Ikrama

NIM : 170801054

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Persepsi Pemilih Terhadap Peran KIP Aceh Selatan Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Kasus Pilkada Aceh Selatan 2018)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 7 November 2021

Yang Menyatakan,

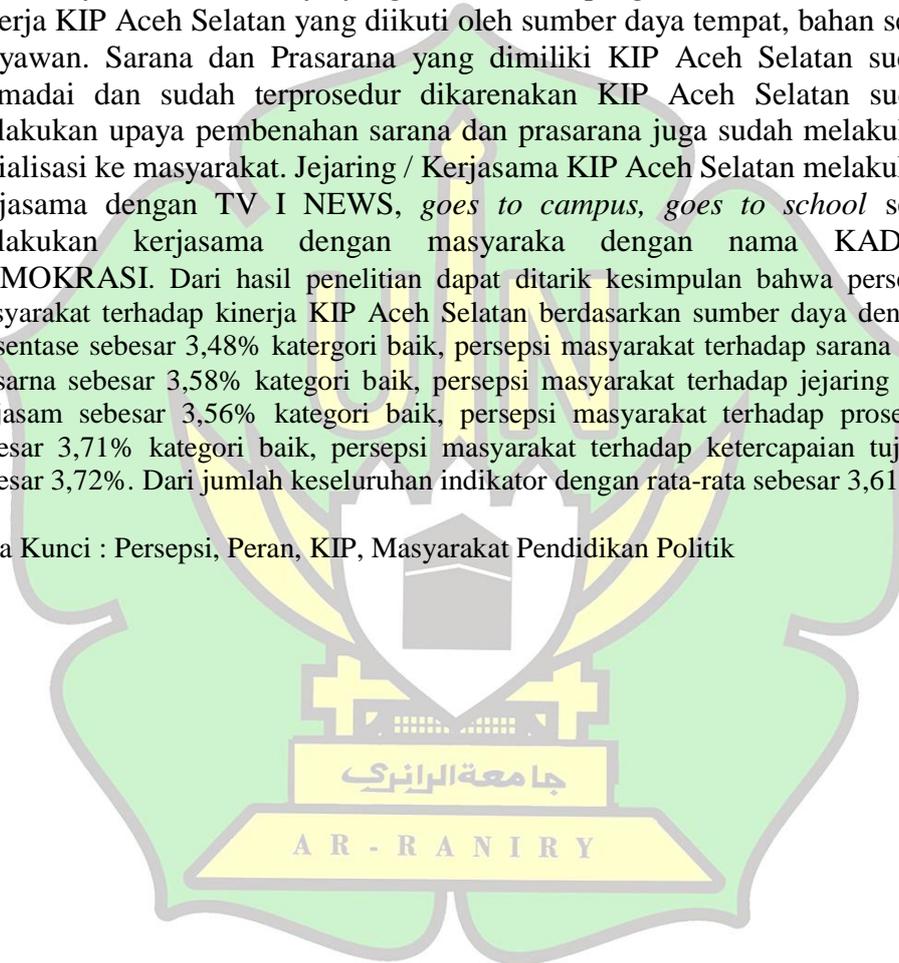


Raziul Ikrama

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran KIP Aceh Selatan dan menganalisis tentang persepsi masyarakat terhadap tantangan KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode (*mixed methods*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi Peran KIP Aceh Selatan terdapat 5 indikator yaitu: Sumber daya yang memberikan pengaruh dominan terhadap kinerja KIP Aceh Selatan yang diikuti oleh sumber daya tempat, bahan serta karyawan. Sarana dan Prasarana yang dimiliki KIP Aceh Selatan sudah memadai dan sudah terprosedur dikarenakan KIP Aceh Selatan sudah melakukan upaya pembenahan sarana dan prasarana juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jejaring / Kerjasama KIP Aceh Selatan melakukan kerjasama dengan TV I NEWS, *goes to campus*, *goes to school* serta melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan nama KADER DEMOKRASI. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja KIP Aceh Selatan berdasarkan sumber daya dengan persentase sebesar 3,48% kategori baik, persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarna sebesar 3,58% kategori baik, persepsi masyarakat terhadap jejaring dan kerjasam sebesar 3,56% kategori baik, persepsi masyarakat terhadap prosedur sebesar 3,71% kategori baik, persepsi masyarakat terhadap ketercapaian tujuan sebesar 3,72%. Dari jumlah keseluruhan indikator dengan rata-rata sebesar 3,61%.

Kata Kunci : Persepsi, Peran, KIP, Masyarakat Pendidikan Politik



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Persepsi Pemilih Terhadap Peran KIP Aceh Selatan Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Kasus Pilkada Aceh Selatan 2018)”**. Penelitian ini penulis ajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shawalat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah *subhanallah wata’ala* kepada Baginda Rasulullah SAW beserta segenap keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Selama penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala dan hambatan. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan didalam skripsi ini, sehingga penulis sangat membutuhkan kritikan serta saran yang membangun, agar penulis bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususya dan bagi pembaca umumnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ermita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.

3. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik
4. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I, dan Bapak Danil Akbar Taqwadin. B,IAM, M.Sc selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Terimakasih kepada Ayah dan Ibunda yang telah mendoakan, menyemangati baik dari segi materil maupun non meteril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan hingga akhir.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu politik angkatan 2017, dan sahabat-sahabat penulis dengan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Terimakasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membakasa kebaikannya. Aminnn

Banda Aceh, 7 November 2021
Penulis,

Raziul Ikrama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Teoritis	14
2.2.1 Persepsi.....	14
2.2.2 Konsep Peran.....	20
2.2.3 Penyelenggara Pemilu	21
2.2.4 Pendidikan Politik Kepemiluan.....	25
2.2.5 Masyarakat Pemilih.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
3.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	44
B. Peran KIP Aceh Selatan	46
C. Hasil Penelitian Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja KIP	58

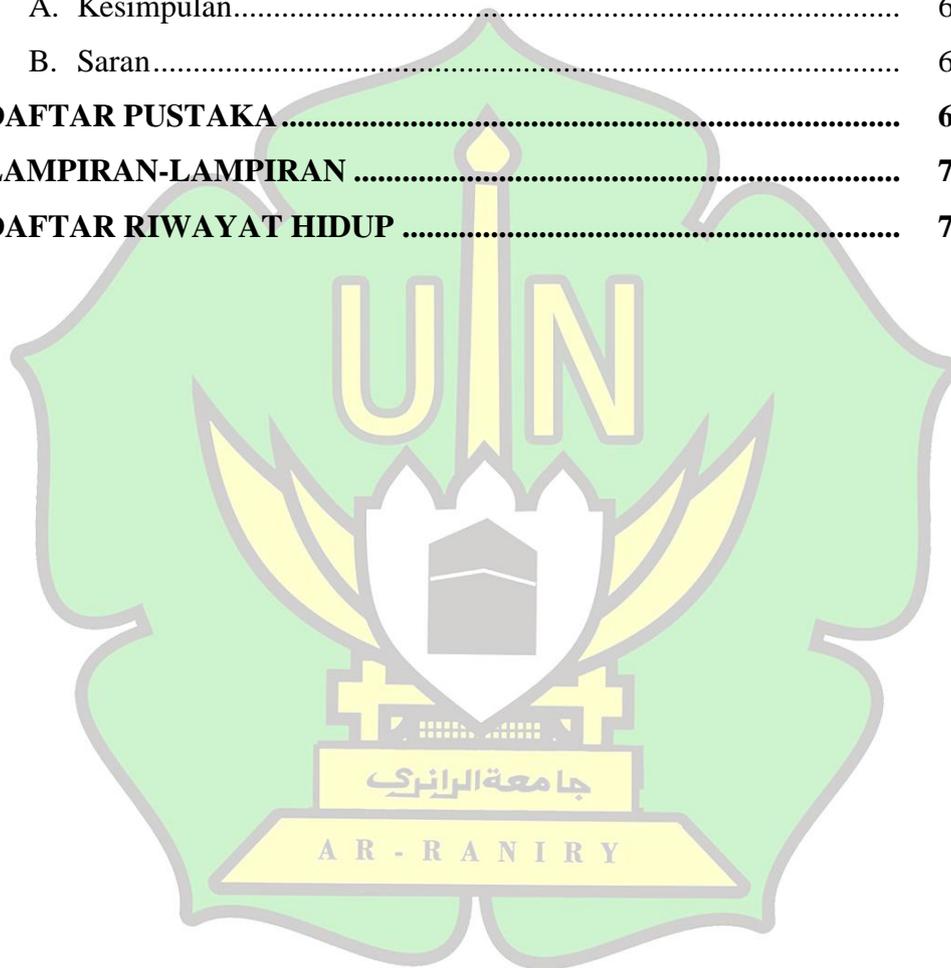
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

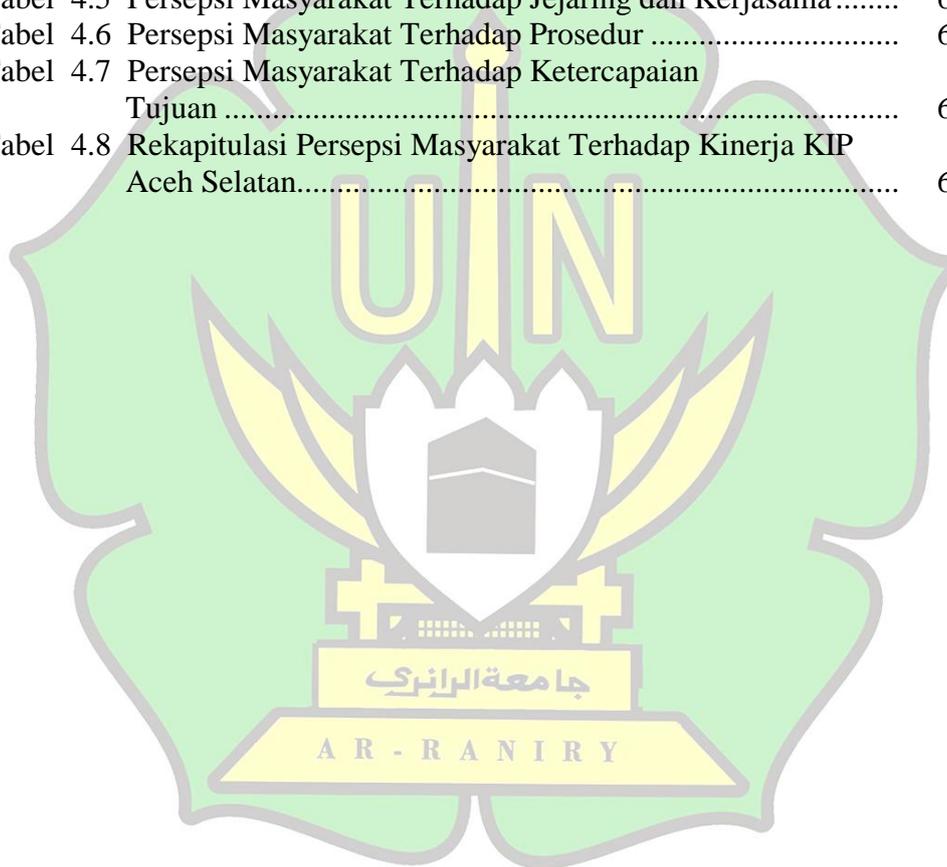
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
-----------------------------------	-----------



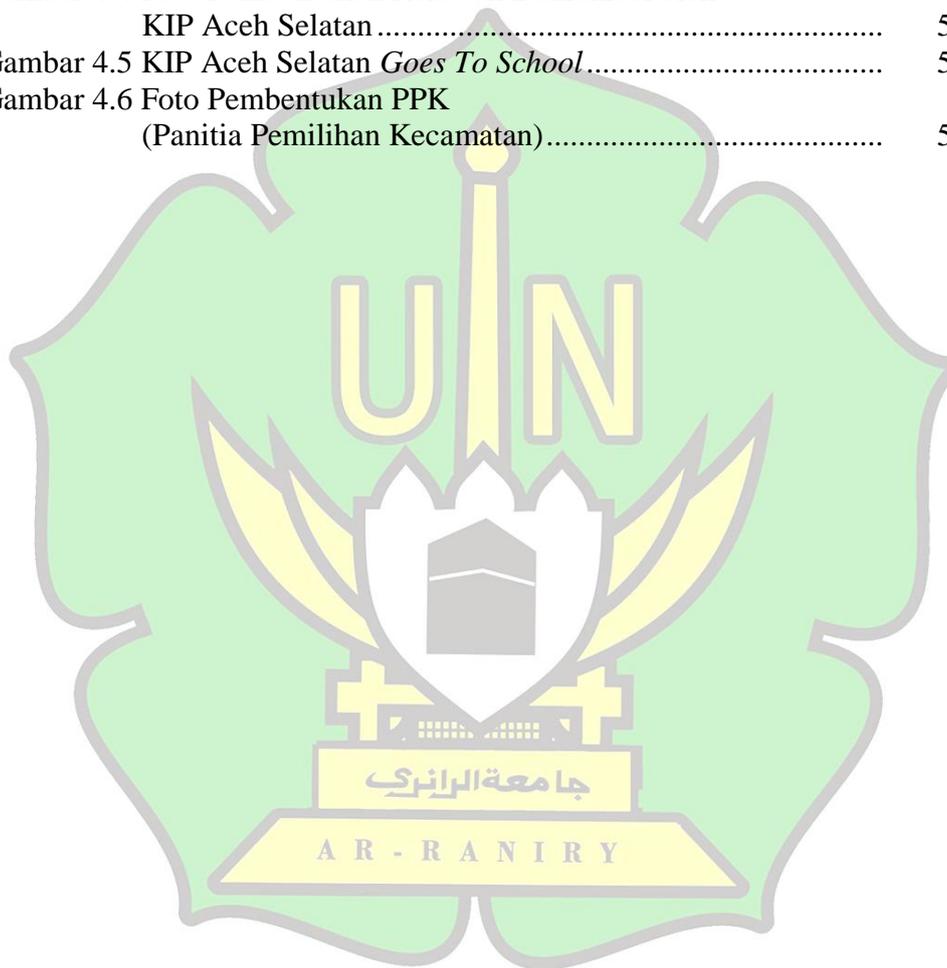
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah DPT, Jumlah Partisipasi Pemilih dan Persentase	7
Tabel 2.1	Definisi Operasional Variabel.....	28
Tabel 3.1	Populasi 6 Kecamatan	36
Tabel 3.2	Distribusi Sampel.....	40
Tabel 3.3	Skala Likert	41
Tabel 3.4	Skala Sikap Masyarakat	42
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.2	Karakteristik responden Berdasarkan Umur	57
Tabel 4.3	Persepsi Masyarakat Terhadap Sumber Daya.....	58
Tabel 4.4	Persepsi Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana	59
Tabel 4.5	Persepsi Masyarakat Terhadap Jejaring dan Kerjasama	60
Tabel 4.6	Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur	61
Tabel 4.7	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketercapaian Tujuan	62
Tabel 4.8	Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja KIP Aceh Selatan.....	63



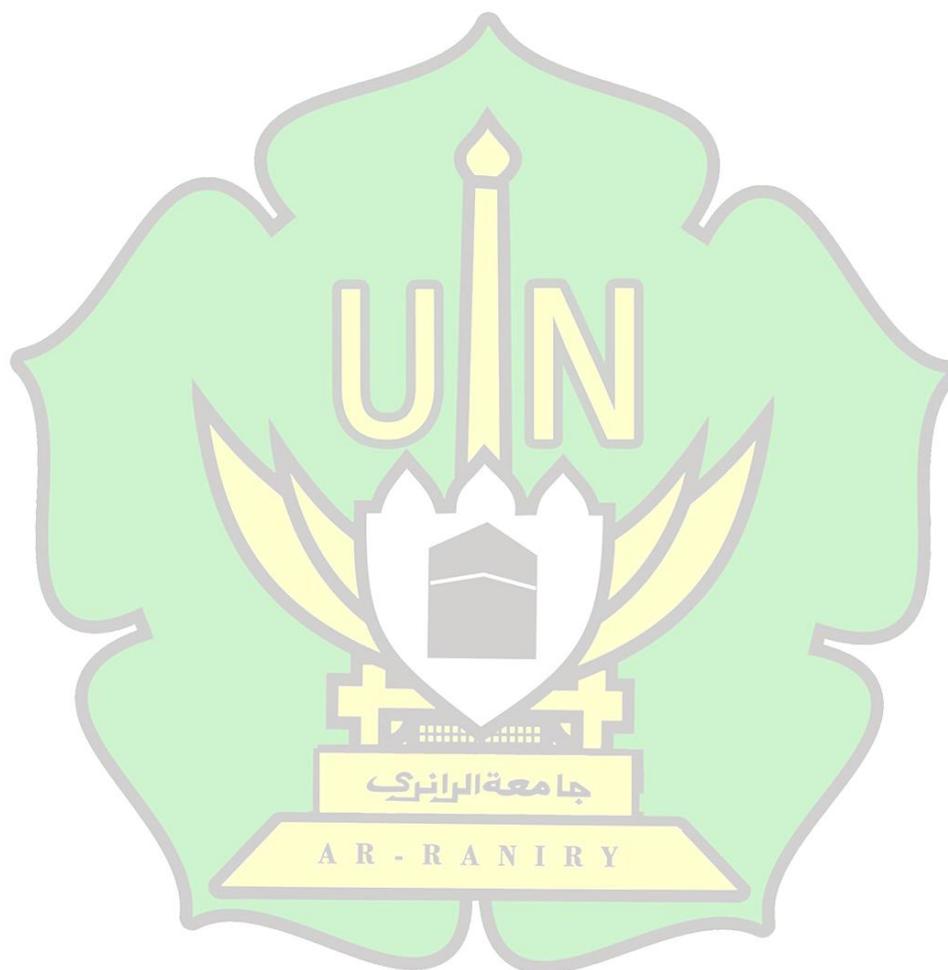
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Foto Spanduk oleh KIP Aceh Selatan untuk Sosialisai Paslon Bupati	48
Gambar 4.2 Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasil Kerjasama KIP Aceh Selatan dengan Stasiun Televisi News	51
Gambar 4.3 KIP Aceh Selatan <i>Goes To Campus</i>	51
Gambar 4.4 Foto Pembentukan Relawan Demokrasi oleh KIP Aceh Selatan	52
Gambar 4.5 KIP Aceh Selatan <i>Goes To School</i>	54
Gambar 4.6 Foto Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Skripsi.....	70
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	71
Lampiran 3. Kuesioner.....	72
Lampiran 4. Pertanyaan Untuk KIP Aceh Selatan.....	76
Lampiran 5. Dokumentasi.....	78
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, seperti negara-negara yang menganut sistem demokrasi pada umumnya, tentunya Indonesia selalu melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk setiap pergantian pemimpin, tercatat sejak tahun 1955 bahkan sampai sekarang Indonesia selalu melaksanakan pergantian pemimpin menggunakan metode pemilu yang demokratis. Ketika berbicara tentang pemilu, maka hal ini tidak dapat dipisahkan oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Independen Pemilihan, atau sering disingkat menjadi KPU. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹

Secara khusus pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga yang bernama KPU dan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum menyatakan, pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan

¹ Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1

umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus di Aceh, semua tugas tugas pokok KPU dilimpahkan kepada lembaga turunan yang bernama Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang didasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Bab II.² Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Yang mana telah jelas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Aceh dan Kabupaten atau Kota se-Aceh adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Untuk penyelenggaraan pemilu ditingkat Provinsi Aceh diselenggarakan oleh KIP Aceh dan untuk Kabupaten atau Kota diselenggarakan oleh KIP Kabupaten atau Kota.

Selain dari beberapa tugas pokok yang telah dijabarkan di atas, KPU serta KIP juga mempunyai tugas sebagai sebuah lembaga yang harus melaksanakan pendidikan politik atau sosialisasi politik, seperti yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12 yang menyatakan bahwa KPU atau lembaga sejenisnya harus “Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU”.

Sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan

² Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Bab II

sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi reaksinya terhadap gejala politik,³

Menurut Kanavagh dalam Harryanto menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melestarikan ataupun mengubah budaya politik di masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut Kenneth P. Langton melihat sosialisasi politik sebagai ‘*political socialization, in the broadest sense, refers to the way society transmits it’s political culture from generation to generation*’.⁴ Yang artinya sosialisasi politik, dalam arti luas, mengacu pada cara masyarakat mentransmisikan budaya politiknya dari generasi ke generasi

Sosialisasi Politik juga dapat diartikan sebagai sebuah metode belajar seseorang terhadap pola pola sosial yang berkaitan dengan posisi posisi kemasyarakatan melalui bermacam macam badan masyarakat. Sedangkan dalam buku subakti yang berjudul *memahami ilmu politik* ia mendefenisikan bahwa sosialisasi politik merupakan satu kesatuan metode penyampaian pesan politik, yang dibagi menjadi dua yaitu Indroktinasi politik dan Pendidikan politik.⁵

Indoktrinasi politik adalah sebuah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai,

³ Rega maran,R. (2001). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta : PT. RINEKA CIPTA hal 136

⁴ Haryanto. (2018) “*Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*” jogjakarta:PolGov, hlm 13

⁵ Ramlan Surbakti.(1999) *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, h. 117

norma dan simbol yang di anggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologi dan latihan yang penuh disiplin.⁶

Melalui aktivitas inilah terjadinya proses pembentukan pengetahuan sertapemahaman dan budaya yang ingin dilestarikan ataupun budaya mana yang ingin diubah. Setelah mereka memahami dan menghayati bagaimana proses politik yang ideal, hal ini diharapkan akan ikut berkontribusi dalam membangun demokrasi indonesia yang lebih baik dari sebelumnya, karna proses demokratisasi tidak dapat dipisahkan dari proses perpolitikan dari suatu wilayah. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perpektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang di inginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal.⁷

Pendidikan politik dalam artian luas adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari hari, disenangi atau tidak, disukai, disadari atau tidak disadari namun pada faktanya proses ini memang benar benar terjadi di tengah tengah kehidupan bermasyarakat, hal ini dialami oleh semua orang, baik itu masyarakat biasa ataupun penguasa.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam

⁶ Ramlan Surbakti. (2002). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka hal 150

⁷ Alfian. (1997). *pemikiran dan perubahan politik indonesia*, jakarta: PT gramedia hal 235

istilah ilmiah adalah saling berinteraksi,⁸ Menurut Phil Astrid S. Susanto (1999), masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang ulang⁹, sedangkan menurut Dannerius Sinaga (1988), masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.¹⁰

Menurut Dewi Fortuna Anwar, dalam Lokakarya Bali bertajuk Peran “Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Partisipasi Berdemokrasi” pada tahun 2020, ia menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran dalam proses berdemokrasi, seperti ikut mempengaruhi proses lahirnya kebijakan public, memiliki kemampuan memberdayakan lingkungan masyarakat dan dapat berkontribusi bersama media masa pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya.¹¹

Kurangnya pendidikan politik pada masyarakat mengakibatkan tidak berkembangnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya menyalurkan partisipasi pada pemilihan umum, sehingga ini berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat yang rendah.¹² Sehingga Baiknya

⁸ Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta hal 118

⁹ Astrid S Susanto.(1999).Komunikasi dalam Teori dan Praktek.Jakarta: Bina Cipta, hal 6

¹⁰ Dannerius Sinaga. (1988). Sosiologi dan Antropologi. Klaten: PT. Intan Pariwara, hal 143

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-1785707/tiga-peran-masyarakat-sipil-dalam-proses-demokrasi> diakses pada 12 juli 2020 pukul 12:00 WIB

¹² Budianto rachmad, (2017) . “*pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2014 di kelurahan simpang pasir kecamatan palaran kota*

pendidikan politik yang di berikan oleh lembaga terkait seperti KPU atau KIP, akan berpengaruh pada tingkat tinggi rendahnya partisipasi masyarakat pada ajang pemilu.

Dalam pelaksanaanya sebenarnya pendidikan politik boleh dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, seperti contohnya lembaga formal (sekolah, kampus, ormas dan lain lain) atau non formal (komunitas, perkumpulan dan lain lain). Disamping itu pendidikan politik juga harus di lakukan oleh media media masa seperti koran, radio, majalah serta tv mengingat cakupan media masa lebih luas.

Holdar dan Zakharchenko dalam Handoyo menyebut pendidikan politik sebagai pendidikan publik (*public education*), yaitu upaya pelibatan warga negara atau masyarakat dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi.¹³

Pendidikan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum¹⁴ hal inilah yang kemudian menjadikan pendidikan politik begitu penting di laksanakan oleh lembaga terkait guna meningkatkan partisipasi politik khususnya pemilu sehingga ini akan berdampak pada terpilihnya pemimpin pemimpin yang mempunyai kualitas terbaik.

samarinda” FISIP universitas mulawarman, hal 105

¹³ Handoyo, Eko. Puji, Lestari. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya hal 10

¹⁴ Arifin, sunarto, hadi cahyono (2018) “*pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik mahasiswa prodi PPKn FKIP universitas muhammadiyah ponogoro pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah provinsi jawa timur tahun 2018*” hal 128

Untuk provinsi Aceh, pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, hanya di laksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Pidie Jaya dan Kota Subulussalam, berikut table hasil pilkada 2018 di provinsi aceh¹⁵

Berikut ini adalah tabel keseluruhan jumlah DPT partipasi pemilih dan persentase:

Tabel 1.1 Jumlah DPT, Jumlah Partisipasi Pemilih dan Persentase

No	Kabupaten/kota	Jumlah DPT	Pemilih berpartisipasi	Persentase
1	Subulussalam	52.600	46.792	88,96 %
2	Aceh selatan	156.411	131.715	84,21%
3	Pidie jaya	107.070	81.177	75,12%

Berdasarkan tabel di atas, untuk Kabupaten/kota Subulussalam menempati nomor satu sebagai jumlah partisipasi pemilih tertinggi sebesar 88,96 persen namun dengan jumlah DPT paling sedikit sebesar 52.600 jiwa jauh di bawah jumlah DPT Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Selatan, nomer tiga disusul oleh Kabupaten Pidie Jaya dengan persentase 75,12 persen dan jumlah DPT paling banyak nomer 2 sebesar 107.070 jiwa.

Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan menempati urutan kedua dengan persentase 84,2 persen, dengan jumlah DPT paling banyak sebesar 156.411 jiwa sehingga menjadikan Aceh Selatan menempati urutan pertama terkait dengan jumlah DPT terbanyak pada pilkada aceh tahun 2018.

¹⁵ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018> di akses pada 18 juni 2021 pukul 22:56 WIB

Pada pilkada pemilihan Bupati Aceh Selatan 2018, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 84,21 persen, pemilih laki-laki berjumlah sekitar 87,07 persen, sedangkan jumlah pemilih perempuan berjumlah sekitar 85,29 persen.¹⁶

Hal ini tentu menjadi prestasi sendiri bagi KIP Aceh Selatan, karna itu bahkan melebihi target KPU pusat yang hanya 77 persen. Arief budiman sebagai ketua KPU mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih pilkada 2018 di 171 daerah sebesar 73,24 persen. Jumlah tersebut tidak mencapai target yang dipatok KPU yakni 77,5 persen, bahkan jumlah partisipasi pada tahun 2018 lebih rendah daripada partisipasi pemilih pada pemilu 2014 sebesar 74 persen¹⁷.

Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih dipengaruhi oleh keefektifan peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik di masyarakat. Asumsi ini yang kemudian menjadi hipotesis yang ingin peneliti uji dan temukan di lapangan terkait apakah persepsi masyarakat sesuai dengan hipotesis awal peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji peneliti adalah :

- a. Bagaimana peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik pada pilkada Aceh Selatan 2018 ?

¹⁶ Elisa Justia (2019) “ *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Aceh Selatan Tahun 2018*” UIN ar raniry. Hal 44

¹⁷https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180630040655-32_310334/partisipasi-pemilih-pilkada-2018-belum-mencapai-targe diakses pada 18 juni 2021 pukul 21:46 WIB

- b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik pada pilkada Aceh Selatan 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagaiberikut :

- a. Menjelaskan peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik, pada pilkada aceh selatan 2018
- b. Menganalisis tentang persepsi masyarakat terhadap peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik pada pilkada Aceh Selatan 2018

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, menawarkan sebuah referensi dan literatur baru tentang KPU khusus mengenai persepsi pemilih terhadap kinerja KIP aceh selatan khususnya dalam melaksanakan pendidikan politik
2. Secara praktis, memberi kontribusi kepada KIP aceh selatan untuk perbaikan tentang kinerja kip aceh selatan khususnya dalam bidang melaksanakan tugas sebagai lembaga pendidikan politik
3. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki ruang lingkup dan keterkaitan tema yang sama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, ada beberapa referensi yang peneliti temukan menyangkut bidang kajian ini, kemudian nantinya penelitian terdahulu yang di temukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian. Sebelumnya kajian ini pernah di teliti oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan Tendri Ampa dalam thesis "Persepsi Pemilih Terhadap Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004" (2004). Dengan objektif kajian Untuk mengetahui persepsi pemilih terhadap independensi KPU Kota Makassar dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan Untuk mengetahui persepsi pemilih terhadap independensi KPU Kota Makassar dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2004. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan survei (*mix methode*), kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2004 di Kota Makassar, dinilai sukses dengan dasar bahwa anggota DPRD Kota Makassar dilantik sesuai dengan tahapan yang telah disusun, berdasarkan SK KPU No. 100 tahun 2003. Akan tetapi pemilu sebagai instrumen demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun, masih menyisakan berbagai

masalah dalam proses pelaksanaannya¹⁸

Kedua penelitian yang dilakukan Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas, dan Jhon Roi Tua Purba dalam journal Trias Politika dengan judul “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2014” Tahun 2017. Objektif kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2014, penelitian ini menggunakan metodologi survei. Dalam penelitian ini, penulis mendapat kesimpulan Pengetahuan pemilih terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum. pemilih pemula yang tidak mengetahui Bawaslu yakni sebanyak 49,7 persen responden. Sedangkan untuk KPU sebanyak 65,1 persen pemilih pemula mengetahui; Kedua, Tingkat kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum cukup baik 57,2 persen pemilih pemula percaya; Ketiga, Persepsi terhadap netralitas lembaga penyelenggara pemilihan umum 50,5 persen; dan Keempat, Profesionalisme Lembaga Pemilu 48,1 persen pemilih pemula menyatakan “professional”.; dan Kelima, Kepuasan terhadap kinerja KPU menyatakan puas hanya 44,4 persen sedangkan 40,5 persen lainnya menyatakan “tidak puas”.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Wahyu Sumunaring Tyas, dalam skripsi ”Persepsi pemilih pemula pada iklan kampanye politik (Studi Deskriptif Kuantitatif Persepsi Pemilih Pemula di Kelurahan

¹⁸ Tendri Ampa 2010 (Persepsi Pemilih Terhadap Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004) hal 100

Karangmalang pada Iklan Kampanye Politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015)” tahun 2015. Objektif kajian dalam penelitian ini Untuk mendeskripsikan persepsi pemilih pemula di Kelurahan Karangmalang tentang kampanye Bupati dan Wakil Bupati melalui media cetak dengan metodologi yang di gunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mendapat kesimpulan Persepsi pemilih pemula dari Aspek *conviction* pada iklan kampanye politik pemilihan bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2015 adalah dalam tingkat yang tinggi atau dikatakan masih ada sebagian pemilih pemula yang memiliki persepsi yang bisa meyakinkannya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sragen tahun 2015.

Keempat penelitian yang dilakukan, Ani wijayanti dalam skripsi “Persepsi pemilih terhadap pelaksanaan PILBUB 2018 di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang” (2019). Objektif kajian ini Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terhadap pelaksanaan dalam pilgu Lampung 2018 dengan menggunakan metodoligi deskriptif dan survei, kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaa PILBUP di Kecamatan Banjar pada tahun 2018 menimbulkan 2 persepsi yang berbeda, yaitu positif dan negatif, persepsi masyarakat yang positif menilai pelasaan pilbub waktu itu cukup berhasil karena pengawasan yang baik dari lembaga terkait, sedangkan sisi negatifnya adalah masih terdapat pelanggaran pelanggaran ketika menuju hari pemilihan.

Dari beberapa literatur di atas terdapat kesamaan dengan penelitian ini pertama, Ampa (2004), Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas, dan Jhon Roi Tua Purba (2017), Tyas (2015) dan Wijayanti (2019) memfokuskan subjek penelitiannya pada persepsi masyarakat, hal inilah yang kemudian menjadi persamaan keempat penelitian di atas dengan penelitian yang ingin diteliti.

Kemudian dalam penelitian Ampa (2004), Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas, dan Jhon Roi Tua Purba (2017) memilih penyelenggara pemilu seperti KPU/KIP dan Banwaslu menjadi objek kajian sedangkan dalam penelitian Tyas (2015) dan Wijayanti (2019) lebih berfokus pada pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Di sini terdapat persamaan objek penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ampa (2004), Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas, dan Jhon Roi Tua Purba (2017), dan terdapat perbedaan dengan penelitian Tyas (2015) dan Wijayanti (2019).

Dalam penelitian Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas, Jhon Roi Tua Purba (2017), Tyas (2015) dan Wijayanti (2019) fokus menggunakan metode kuantitatif untuk penelitiannya, sedangkan dalam penelitian Ampa (2004) ia menggunakan metode *mix methode*. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Dalam penelitian Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas, Jhon Roi Tua Purba (2017), Tyas (2015) dan Wijayanti (2019) dan terdapat persamaan metode penelitian yang digunakan Ampa (2004) yaitu sama sama menggunakan *mix*

methode.

Penelitian Ampa (2004) berlokasi di Makassar, penelitian Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas, Jhon Roi Tua Purba (2017) bersifat nasional, penelitian Tyas (2015) berlokasi di kabupaten sragen dan penelitian Wijayanti (2019) berlokasi di Kabupaten Tulung Agung, sedangkan penelitian ini akan di laksanakan di kabupaten Aceh Selatan.

Selain itu, untuk kajian penelitian, Ampa (2004) memilih fokus pada pemilu legislatif 2004, Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas dan Jhon Roi Tua Purba (2017) memilih Pilpres 2014, Tyas (2015) dan Wijayanti (2019) sama sama memilih kajian penelitian tentang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil bupati.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna¹⁹

¹⁹ Bimo Walgio,(2005) Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 99

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera (melihat, mendengar, mencium, menyentuh dan merasakan).²⁰

Philip kottler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.²¹ Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan.²²

Dari beberapa devinisi di atas dapat di simpulkan bahwa, persepsi adalah suatu respon atau tanggapan yang di berikan oleh seseorang sehingga mereka bisa menyimpulkan suatu informasi.

i. Sifat-Sifat Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, BalaiPustaka hal 215.

²¹ Philip kottler, (1997). Manajemen pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta , hal 164

²² Joyce Marcella Laurence,(2004) Joyce Marcella Laurence, Arsitektur dan Prilaku Manusia, PT. Grasindo, Jakarta, hal 56

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, prinsipnya persepsi adalah makna kepada stimulus indrawi.²³

Ada beberapa sifat persepsi antara lain adalah :

a. Persepsi Bersifat Relatif

Dasar pertama dari perubahan rangsangan dirasakan lebih besar dari pada rangsangan yang datang kemudian. Keadaan ini tidak mutlak, mengingat faktor lain yang berperan misalnya intensitas perhatian. Dalam kejadian semacam ini kita tahu bahwa manusia bukanlah yang mampu menyerap segala sesuatu persis keadaan sebenarnya, misalnya seseorang tidak dapat menyebutkan secara persis kecepatan sebuah sepeda motor yang sedang lewat, tetapi relatif menerka kecepatan sepeda motor tersebut, dalam hal ini satu benda dapat dipakai patokan. Begitupun kecepatan sepeda motor yang lewat dapat diperkirakan lebih lambat, cepat atau lebih cepat dan sepeda motor menjadi patokan.²⁴

b. Persepsi Bersifat Selektif

Merupakan objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu

²³ Jalaluddin Rahmat, (2001). Psikologi komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revolusi, h. 51

²⁴ Ibid, h. 103

yang melakukan persepsi.²⁵ Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja pada saat tertentu, rangsangan yang diterima tergantung pada apa yang pernah dipelajari, apa yang menarik perhatian dan kearah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan.

c. Persepsi Mempunyai Tatanan

Seseorang menerima rangsangan tidak dengan sembarangan, ia akan menerima dalam bentuk hubungan atau kelompok-kelompok jika rangsangan yang datang tidak lengkap ia akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas.

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerimaan rangsangan)

Harapan dan kesiapan dalam penerimaan pesan akan menentukan pesan mana yang dipilih untuk diterima kemudian disusun dan diinterpretasikan

2. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu . faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh luar biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap didalam diri manusia terutama yang

²⁵ Ibid, h. 55

menjadi minat perhatiannya. dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu.²⁶

a. Faktor Internal

Faktor yang terdapat dalam diri pribadi manusia. Beberapa faktor dalam diri seseorang mempengaruhi proses persepsi antara lain

- i. Fisiologi yaitu informasi yang masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.
- ii. Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek.
- iii. Minat, persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dikatakan sebagai minat.
- iv. Kebutuhan yang searah, dilihat dari kuatnya seorang individu mencari objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
- v. Pengalaman dan ingatan, pengalaman tergantung pada sebuah ingatan dimana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian

²⁶ Abu Ahmadi, (1979). Psikologi Sosial, Surabaya: PT. Bina Ilmu, h. 52

lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

- vi. Suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang

b. Faktor eksternal

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya.

- i. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Persepsi seseorang terbentuk karena individu dengan melihat ukuran suatu objek dan penempatan yang sesuai.
- ii. Warna dari objek-objek. Objek yang mempunyai cahaya atau warna lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibanding dengan yang sedikit.
- iii. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang 24 sama sekali diluar sangkutan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
- iv. Intensitas dan kekuatan stimulus. Stimulus akan lebih bermakna apabila sering diperhatikan dibanding hanya sekali dilihat.
- v. Motion atau gerakan. Individu akan banyak emberikan perhatian lebih terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.²⁷

²⁷ Ani wijayanti, (2019) ” Persepsi pemilih terhdsdp pelaksanaan PILBUB 2018 di

2.2.2 Konsep peran

Dalam setiap organisasi baik itu organisasi pemerintahan ataupun non pemerintahan, tentunya mereka perlu melakukan suatu peran menurut tujuannya masing masing.

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu.²⁸ Sedangkan menurut Soekanto, Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.²⁹ Keduanya tidak dapat dipisahkan karena hal itu memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peran merupakan kelengkapan dari hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. di dalam peranan, terdapat dua harapan, yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya

kecamatan banjar agung Kabupaten Tulang Bawang” UIN raden intan, hal 24

²⁸ Sarwono, Sarlito Wirawan. (2014). Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, hal 215

²⁹ Soekanto, Soejono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, ha 212

Teori peran merupakan salah satu perpektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang berpendapat bahwa sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ayah, anak, dosen). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Rancangan ini didasarkan pada pengamatan bahwa bahwa setiap orang bertindak menggunakan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan letak sosial dan faktor- faktor lainnnya.

Peranan dapat dibedakan menjadi dua yaitu peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Peranan Perseorangan (Individual) yaitu pengharapan-pengharapan tingkah laku didalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-individu itu sendiri

2.2.3 Penyelenggara pemilu

Dalam proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam bidang pemilihan umum, di kenal sebuah lembaga yang bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 13 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi PemilihanUmum, melainkan perkataan

umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu.

Keterangan mengenai komisi pemilihan umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 Ayat 8, 9 dan 10 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat menjadi KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, selanjutnya pada ayat 9 disebutkan Komisi Pemilihan Umum provinsi yang selanjutnya di singkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu provinsi dan pasal 10 disebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu Kabupaten/Kota

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU

diharuskan non-partisipan.³⁰

Di Aceh, tugas tugas KPU dilaksanakan oleh lembaga yang bernama Komisi Independen Pemilihan (KIP), pembentukan KIP sendiri didasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Bab II.³¹ Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Yang mana telah jelas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Aceh dan Kabupaten atau Kota se-Aceh adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Untuk penyelenggaraan pemilu ditingkat Provinsi Aceh diselenggarakan oleh KIP Aceh dan untuk Kabupaten atau Kota diselenggarakan oleh KIP Kabupaten atau Kota.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU serta KIP sebagai lembaga perpanjangan mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,

³⁰Adeputerahemas, Muhammad, (2019) “Peran Komisi Pemilihan umu (KPU)dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal” universitas negeri semarang, hal 14

³¹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Bab II

5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,

³² <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan> di akses pada 10 januari 2022

3. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
4. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
5. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
6. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN³³

2.2.4 Pendidikan politik kepemiluan

Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politik serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan.³⁴

Menurut Suroso sebagaimana dikutip Ramdlang Naning, Pendidikan

³³ <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan> di akses pada 10 januari 2022

³⁴ Kartono, Kartini. (1989). *Pendidikan Politik*. Bandung: CV. Mandar Maju hal 3

politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara³⁵.

Pendidikan politik diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi, yaitu berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan dan realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal.³⁶

a. Fungsi pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi kehidupan politik sebuah negara, ada beberapa fungsi dari pendidikan politik, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.³⁷

³⁵ Ramdlang Naning, (1982), Pendidikan Politik dan Regeneras, Jakarta, Liberty hal 8

³⁶ Alfian. (1978). *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia hal 235

³⁷ Kantaprawira, Rusadi, (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model*

2. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga Negara yang baik khususnya dalam fungsi social dan fungsi politik, seperti bias kerja sama: bersikap toleran, loyal terhadap bangsa dan Negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
3. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insan politik terpuji (bukan memupuk egoism dan menjadi bintang politik).
4. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada ditengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu bias berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
5. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik yang aktual, lalu berusaha ikut memecahkan, jadi terdapat partisipasi politik. Urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan pada umumnya.³⁸

Pengantar, Edisi Revisi, Sinar baru Algensindo, Bandung hal 55

³⁸ Nazsir. Nasrullah dan Amril Ghaffar Sunny. (2004). Partai Politik, Partisipasi. Politik dan Pendidikan Politik. Bandung: PPS FISIP UNPAD hal 104

Tabel 2.1 Defenisi Oprasional Variabel

No	Variabel	Devinisi	Indikator	Cara ukur	Alat ukur
1	Pendidikan politik	Usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara	Pendidikan politik Ketercapaian tujuan Prosedur Sumber daya Sarana dan prasarana Jejaring dan kerjasama ³⁹	Mengisi angket	Kuisisioner

2.2.5 Masyarakat pemilih

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling bergantung satu sama lain sehingga menciptakan sebuah sistem di mana mereka saling melakukan interaksi antar individu dengan individu di dalam kelompok tersebut. masyarakat juga dapat di sebut sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dan terbuka yang pada akhirnya bisa menciptakan sebuah komunitas.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abdul sani yaitu kata masyarakat berasal dari musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya, berkumpul bersama, hidup bersama saling

³⁹ Amrazal.,et,al, "The Role Of General Election Commision (KIP) In Increasing Voters Parcpitation In Langkat Medan Indonesia" Journal BRICL, Vol.1,Juni 2018, hal 15-20

berhubungan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia)⁴⁰

Menurut Auguste Comte dalam Abdul sani “Masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri”⁴¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama kemudian membentuk sebuah interaksi antar sesama yang memiliki tujuan dan pemikiran yang sama. Masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.⁴²

Dalam penelitian ini, masyarakat yang di maksud lebih di spesifikkan menjadi masyarakat indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu, adapun syarat masyarakat menjadi pemilih adalah sebagai berikut:

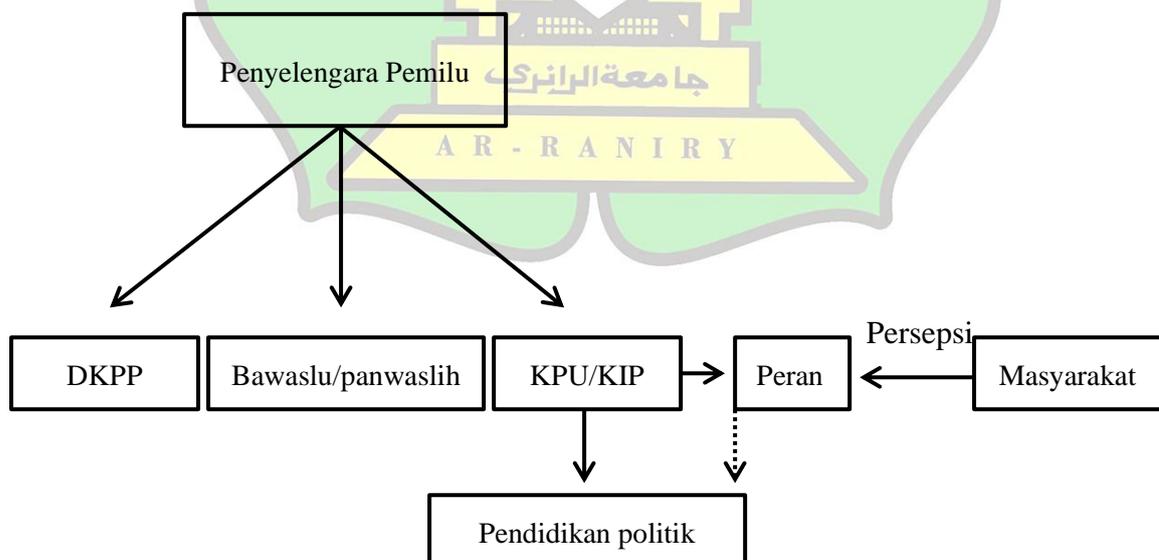
⁴⁰ Sani, Abdul. (2007). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta hal 30

⁴¹ Ibid, h. 31

⁴² Ibid, h. 32

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutansuara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan E-KTP
5. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, Pemilih dapat mengg unakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagan 1 kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya⁴³. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian campuran (Mixed Methods). Metode campuran merupakan pendekatan yang menghubungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif, dalam arti luas pendekatan ini menggunakan kedua metode secara bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian.⁴⁴ Metode penelitian kuantitatif dapat di gunakan dalam menjawab rumusan masalah yang pertama, sedangkan metode kualitatif deskriptif dapat di gunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ke dua.

Kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik⁴⁵. Sedangkan penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

⁴³ Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. Hal 3

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani , (2017). "Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi" Bandung: Pustaka Setia, hlm 341

⁴⁵ Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta hal 15

berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁴⁶

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk melihat peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik pada pilkada 2018, sedangkan metode penelitian Penelitian kuantitatif di gunakan atas dasar alasan ingin melihat tentang persepsi masyarakat tentang kinerja KIP aceh selatan dalam melaksanakan pendidikan politik pada masa pilkada aceh selatan 2018, hal ini di lakukan dengan cara membagikan kuisisioner dan menyajikan data berdasarkan statistik atau data data yang berbentuk angka angka. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan tentang variabel, gejala atau keadaan

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran atau fakta fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan tentang variabel, gejala atau keadaan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan

⁴⁶ Iskandar, (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif .Jakarta: Gaung Persada, hal 11

beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi lokus penelitian adalah wilayah pemilihan aceh selatan, namun tidak semuanya, melainkan hanya kecamatan yang di pilih peneliti sesuai kemampuan, adapun kecamatan yang di pilih peneliti adalah:

1. Bakongan
2. Kluet Timur
3. Kluet Selatan
4. Tapak Tuan
5. Pasie Raja
6. Kluet Utara

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data dengan Pendekatan Kualitatif

Dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang di gunakan peneliti untuk

mendapatkan data yang di perlukan di antaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan acuan dalam melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi tertentu, sehingga peneliti memperoleh aspek-aspek yang akan diteliti. Data yang diperoleh berupa interaksi, perilaku dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi berfokus pada aspek-aspek yang akan diamati.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden baik lisan maupun tulisan agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung data penelitian. Teknik ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden nya sedikit, dalam teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁴⁷

c. Studi Pustaka/Dokumentasi

Studi Pustaka atau dokumentasi adalah salah satu cara yang di gunakan untuk memperoleh suatu informasi dan data penelitian, Teknik ini di lakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literasi baik dari jurnal, buku atau media bacaan yang lainnya, selain literasi, studi pustakan dapat juga di lakukan dengan mengkaji beberapa foto yang dapat menambah informasi penelitian.

⁴⁷ Sugiyono,(2013). Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm 157

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data dengan Pendekatan Kuantitatif

a. Kuisisioner Atau Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁴⁸ Kuisisioner ini di gunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja KIP aceh selatan dalam melaksanakan Pendidikan politik dari responden yang kemudian nantinya pada akhir penelitian akan di analisis

b. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁹ Populasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Aceh selatan yangtelah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada Aceh selatan tahun 2018, denganjumlah total populasi pemilih tetap sekitar 156.411.⁵⁰

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil 62.454 dari total jumlah populasi diatas karena hanya memilih 6 kecamatan di Aceh Selatan yaitu, Bakongan, Kluet Timur, Kluet selatan, Tapak Tuan, Pasie Raja dan Kluet Utara.

Untuk lokasi penelitian Bakongan, peneliti memilih lokasi tersebut karena

⁴⁸ Ibid, h. 199

⁴⁹ Rachmat Kriyantono, (2006). Teknik Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada

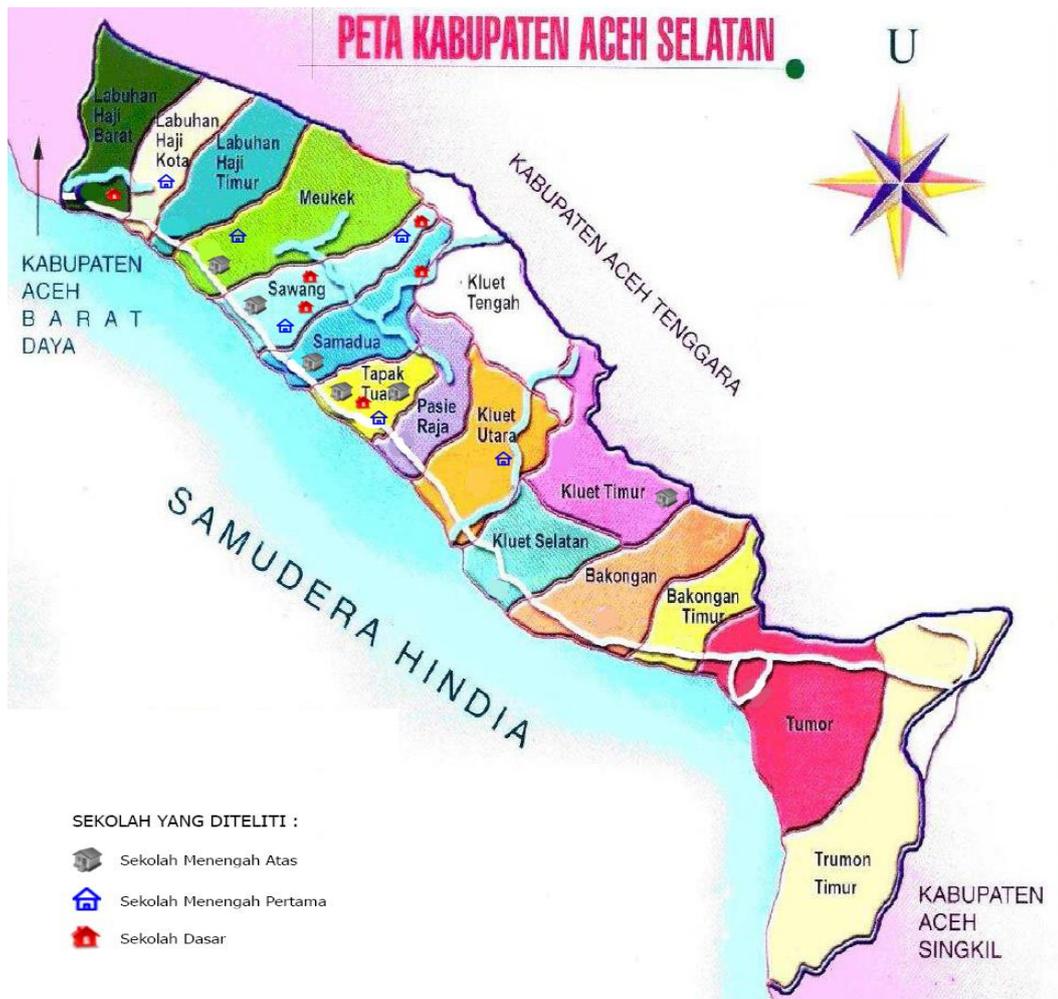
⁵⁰ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/ACEH/ACEH%20SELATAN/> diakses pada sabtu 30 januari 2021, 13:28 WIB

dinilai bisa mewakili kecamatan Trumon, Trumon Timur, Trumon Tengah, Bakongan Timur, Kota Bahagia, selain itu bakongan juga dinilai menjadi central dari beberapa kecamatan tersebut. Kemudian kecamatan Kluet Timur, Kluet Selatan dan Kluet Utara dipilih Karena dinilai dapat mewakili wilayah Kluet Raya, dilain sisi tiga wilayah kecamatan itu juga memiliki penduduk yang lebih maju dan mudah di akses dunia luar.

Untuk kecamatan Pasie Raja di pilih karena letak geografisnya berada di tengah tengah kabupaten aceh selatan sehingga dapat mewakili wilayah tengah, sedangkan Kecamatan Tapak Tuan dipilih karena alasan lokasi ini merupakan ibu kota Aceh Selatan serta memiliki masyarakat yang dinilai mempunyai pendidikan politik yang cukup tinggi, alasan lain mengapa memilih Tapak Tuan sebagai lokasi penelitian adalah letak kantor KIP Aceh Selatan yang berada di kecamatan tersebut sehingga banyak kegiatan kegiatan yang di lakukan KIP aceh selatan berada di lokasi ini. Adapun table populasi dari 6 kecamatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1 Populasi 6 Kecamatan

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah populasi (jumlah pemilih tetap)
Aceh Selatan	Bakongan	3.434
	Kluet Timur	6.745
	Kluet Selatan	9.300
	Tapak Tuan	14.830
	Pasie Raja	11.037
	Kluet Utara	17.108
Total	6	62.454



c. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasinya besar dan peneliti tidak mampu untuk mempelajari semua yang terdapat didalam populasi tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka peneliti bisa mengambil sampel dari populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar benar *representative* (mewakili)⁵¹

⁵¹ Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta hal 81

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling probabilitas (probability sampling) yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara tidak mengikuti panduan matematis yang berdasarkan teori, kemungkinan dimana setiap unit untuk terpilih sebagai sampel yang telah diketahui. Teknik penarikansampling probabilitas dilakukan dengan cara menggunakan teknik sampling random (acak) dari suatu daftar yang berisi seluruh nama anggota populasi yang tengah diambil sampelnya

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10 persen dan tingkat kepercayaan 90 persen yaitu:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

N: populasi

n: Sampel

d: Presisi (digunakan 10% atau 0,1)

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{62.454}{62.454(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{62.454}{62.454(0,01)^2 + 1}$$

$$n = \frac{62.454}{0,62.454 + 1}$$

$$n = \frac{62.454}{1.62454}$$

$$n = 9,99...n \approx 100$$

Berdasarkan rumus di atas, dapat di ambil kesimpulan sample yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah 100 sample atau responden, untuk memperoleh jumlah sample di setiap kecamatan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{nl \cdot ni}{N}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel dari setiap kecamatan

nl: Jumlah pemilih dari tiap kecamatan

ni: Jumlah sampel keseluruhan

N: Jumlah populasi (Arikunto,2006)

Dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan Bakongan

$$n = \frac{3.434 (100)}{62.454} = 5,51$$

Kecamatan Kluet Timur

$$n = \frac{6.745 (100)}{62.454} = 10,8$$

Kecamatan Kluet Selatan

$$n = \frac{9.300 (100)}{62.454} = 14,81$$

Kecamatan Kluet Utara

$$n = \frac{17.108 (100)}{62.454} = 27,39$$

Kecamatan Pasieraja

$$n = \frac{11.830 (100)}{62.454} = 17,70$$

Kecamatan Tapak Tuan

$$n = \frac{14.830 (100)}{62.454} = 23,76$$

Setelah jumlah masing masing kecamatan telah di temukan, maka nilai desimal yang di bulatkan menjadi:

Tabel 3.2 Distribusi Sampel

No	Nama Kecamatan	Populasi	Sampel
1	Bakongan	3.434	5
2	Kluet timur	6.745	11
3	Kluet selatan	9.300	15
4	Tapak tuan	14.830	24
5	Pasie raja	11.037	18
6	Kluet utara	17.108	27
Total	6	62.454	100

d. Skala Pengukuran

Setelah mendapat data dari responden di lapangan, maka untuk menentukan hasil dari kuisioner tersebut, di perlukan alat untuk mengukur data, dalam penelitian ini, adapun skala pengukuran yang di gunakan adalah skala likert.

Skala likert ini merupakan alat untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial, namun dalam penelitian ini, skala likert digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat.

Tabel 3.3 Skala Likert

No	Symbol	Keterangan	Skor
1	SB	Sangat Baik	1
2	B	Baik	2
3	CB	Cukup Baik	3
4	TB	Tidak Baik	4
5	STB	Sangat Tidak Baik	5

(Ridwan, 2017)

Untuk mendapatkan pemeringkatan persepsi masyarakat, diajukan beberapa pertanyaan dengan total nilai maksimum 5 dan dan minimum 1. Selanjutnya nilai setiap responden dijumlahkan dan dibuat pemeringkatan dengan skala penilaian sebagai berikut:

- a. Untuk persepsi masyarakat

$$\text{Selisih per kategori} = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Selisih per kategor} = \frac{5-1}{5}$$

Selisih per kategori= 0,8

Berdasarkan rumus diatas, dapat dilihat tingkat nilainya masing-masing seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Skala Sikap Masyarakat

No	Skala Sikap Masyarakat		
	Sikap	Skor	Kategori
1	Sangat Setuju/Sangat Baik	5	> 4,2 - 5,0
2	Setuju/Baik	4	> 3,4 - 4,2
3	Ragu-ragu/Cukup Baik	3	> 2,6 - 3,4
4	Tidak Setuju/Kurang Baik	2	> 1,8 - 2,6
5	Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak baik	1	1,0 - 1,8

Sumber :Hasil modifikasi Skala Likert (Yudiantari, 2002)

3.5 Teknik Analisis Pengumpulan Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁵² Teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara:

- a. Tahap reduksi data, peneliti di haruskan memiliki kemampuan berpikir positif dan peka terhadap permasalahan dan melakukannya dengan pengetahuan yang tinggi agar hasil penelitian sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
- b. Tahap penyajian data, penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah

⁵² Sugiyono, (2008). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal 244

dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

- c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah diteliti.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah aceh selatan. Adapun kecamatan yang dipilih peneliti adalah: Bakongan, Kluet Timur, Kluet Selatan, Tapaktuan, Pasie Raja, dan Kluet Utara. Hasil penelitian ini diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan keterangan mengenai Persepsi Terhadap Kinerja KIP Aceh Selatan dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Kasus Pilkada Aceh Selatan 2018).

Profil KIP Aceh Selatan

Komisi Independen Pemilihan (KIP), adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden / Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRD/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.

KIP hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keberadaan KIP diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya dirinci dalam Qanun Nomor 2, 3, dan 7 Tahun 2006.

KIP Aceh beranggotakan 7 orang sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc dan menjabat selama lima tahun. Anggota KIP Aceh Selatan saat ini dilantik oleh Bupati Aceh Selatan pada tanggal 19 Agustus 2013 sesuai dengan SK KPU RI Nomor

592/KPTS/KPU/2013 tanggal 16 Juli 2013 untuk periode 2013-2018.⁵³

Susunan anggota KIP Aceh Selatan saat ini adalah: Khairunis Absyir, ST (Ketua), Nasri Zahnoery (Ketua Divisi Hukum), Syamsuhardi, SP (Ketua Divisi Sosialisasi), Edi Syahputra, ST (Ketua Divisi Teknis Penyelenggara) dan Saiful, SE (Ketua Divisi Keuangan dan Logistik).⁵⁴

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
3. Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
4. Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala
5. Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
7. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai

⁵³ Data Dokumentasi KIP Aceh Selatan, Tahun 2018

⁵⁴ Data Dokumentasi KIP Aceh Selatan, Tahun 2018

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁵⁵

B. Peran KIP Aceh Selatan

a. Sumber Daya

Sumber daya merupakan sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya adalah seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Adapun prosedur sumber daya yang dilaksanakan di KIP Aceh Selatan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sumber daya KIP Aceh Selatan. Ketika ditanyakan sumber daya apa yang dimiliki KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas khususnya melakukan pendidikan politik? Apakah sumber daya tersebut cukup untuk memaksimalkan peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik? Sejauh ini apa yang telah dilakukan pihak KIP Aceh Selatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki contohnya pada pegawai-pegawai kantor KIP Aceh Selatan? Lalu Ketua KIP mengatakan bahwa:

“Sumber daya yang di miliki KIP Aceh Selatan saat ini cukup memadai, KIP Aceh Selatan saat ini memiliki staf dan karyawan sebanyak 26 orang, sedangkan berdasarkan peraturan pusat idealnya setiap kabupaten memiliki 30 staf dan karyawan. Artinya KIP Aceh Selatan masih kekurangan 4 orang karyawan atau staf, selain staf dan karyawan KIP Aceh Selatan juga memiliki 1 buah rumah yang sifatnya pinjam pakai yang di gunakan sebagai sekretariat KIP Aceh Selatan. Dengan staf dan karyawan tersebut, KIP Aceh Selatan berusaha selalu aktif dalam memberikan sosialisasi dalam bentuk Pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas karyawan dan dan staf nya, KIP Aceh Selatan sering mengikuti pelatihan pelatihan yang di selenggarakan oleh KIP Provinsi maupun KPU pusat.”⁵⁶

Berdasarkan kajian hasil evaluasi dan monitoring kinerja KIP Aceh Selatan dapat diketahui seberapa besar presentase yang diakibatkan oleh ketersediaan

⁵⁵ <https://kab-acehselatan.kpu.go.id/>

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua Devisi KIP Aceh Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 10:00 – 12:00 WIB, Sekretariat KIP Aceh Selatan.

sumber daya yang dimiliki oleh KIP Aceh Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dari ketua KIP mengatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh KIP cukup memadai. Berdasarkan hasil analisis, dimana sumber daya / tenaga kerja merupakan sumber daya yang memberikan pengaruh dominan terhadap kinerja KIP Aceh Selatan, diikuti oleh sumber daya bahan, tempat, serta staf/karyawan dan didukung oleh pernyataan-pernyataan yang ada dalam indikator sumber daya, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dominan mempengaruhi kinerja KIP Aceh Selatan adalah sumber daya / tenaga kerja yang diwakili oleh variabel lingkungan kerja dan kualitas kerja.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang atau suatu hal yang sangat penting dalam pekerjaan yang merupakan pelengkap individu melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang sifatnya terorganisasi. Sarana merupakan benda atau suatu alat yang bergerak sebagai salah satu penunjang untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan prasarana merupakan tempat atau juga kantor untuk melaksanakan kegiatan organisasi yang sifatnya terstruktur. Di butuhnya manajemen yang baik untuk mewujudkan suatu sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan menurut Gunawan dan Benty, (2013), Sarana prasarana merupakan perlengkapan yang dimanfaatkan oleh suatu lembaga atau instansi, setiap lembaga memiliki makna tentang sarana dan prasarana yang berbeda sesuai dengan fungsionalnya, sarana prasarana memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi di instansi atau di sebuah perusahaan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana harus memiliki manfaat yang berdayaguna sesuai dengan kebutuhan suatu instansi atau perusahaan masing-masing. Sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting yang harus ada dalam perusahaan sebagai benda atau tempat melakukan aktivitas pekerjaan.

Hal ini juga diakui oleh Ketua KIP berhubungan dengan sarana dan prasarana KIP Aceh Selatan dengan mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang di miliki aceh selatan antara lain 1 mobil kantor dan 2 motor yang di gunakan untuk keperluan pekerjaan KIP Aceh Selatan, selain itu KIP Aceh Selatan juga membuat spanduk serta baliho untuk memberikan sosialisasi politik pada masyarakat. Di sisi lain KIP Aceh Selatan juga memiliki media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemilu dan melakukan sosialisasi politik untuk kaum milenial”⁵⁷



Gambar 4.1 Foto Spanduk oleh KIP Aceh Selatan untuk Sosialisasi Paslon Bupati

Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh kepala pengelolaan barang yaitu staf pengelola barang yang sebelumnya terlebih

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Devisi KIP Aceh Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 10:00 – 12:00 WIB, Sekretariat KIP Aceh Selatan

dahulu kepala KIP menyetujui agenda belanja. Rencana kegiatan anggaran sarana dan prasarana yang diajukan tidak semua dapat direalisasikan. Ada yang disetujui dan tidak disetujui, yang disetujui menjadi Dokument Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga pembelian sarana dan prasarana tidak memenuhi kebutuhan setiap bidang, namun disesuaikan dengan DPA yang telah disetujui dan ditetapkan, seperti misalnya mobil kantor dan motor yang digunakan untuk keperluan KIP, serta media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemilu dan melakukan sosialisasi politik untuk kaum milenial.

Sarana dan prasarana lainnya yaitu melaksanakan sosialisasi dengan tujuan yang pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya untuk memilih. Banyak kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat baik itu pemilih pemuda dan lain sebagainya. Menurut Syamsuhadi selaku mantan ketua divisi sosialisasi KIP Aceh Selatan menyatakan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana tersebut dengan mudah langkah yang dilakukan oleh KIP Aceh Selatan sudah terprosedur dan sudah pada semestinya dikarenakan KIP Aceh Selatan sudah melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat bahwa pemilu adalah hal yang penting dilakukan dalam negara demokrasi.⁵⁸

c. Jejaring/Kerjasama

Jejaring/Kerjasama merupakan salahsatu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuhadi tanggal 17 Oktober 2021 via watshap.

saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Pelaksanaan kerjasama dan system informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahapan penjajakan, tahapan penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan.⁵⁹

Selanjutnya peneliti meninjau sejauh mana jejaring dan kerjasama yang dilakukan oleh KIP Aceh Selatan dalam Persepsi Terhadap Kinerja KIP Aceh Selatan dalam Melaksanakan Pendidikan Politik dengan mengajukan pertanyaan mengenai Apakah pihak kepada Selatan mempunyai jejaring dan kerjasama khususnya dalam hal pendidikan politik? Jejaring dan kerjasama seperti apa yang telah dilakukan KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik? Apakah jejaring dan kerjasama yang dilakukan KIP Aceh Selatan memiliki dampak terhadap pendidikan politik masyarakat? Lalu Ketua KIP menjawab:

“Pada tahun 2018. KIP Aceh Selatan melakukan beberapa kerjasama dengan berbagai instansi dalam misi melakukan pendidikan politik, seperti contohnya, melakukan kerjasama dengan stasiun TV I NEWS, bentuk kerjasama yang dilakukan adalah menyiarkan langsung debat calon bupati dan wakil bupati di tv, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menentukan pilihan yang biasa di nilai dari acara debat tersebut. Selain itu, KIP Aceh Selatan juga melakukan kerjasama dengan kampus di Aceh Selatan dan sekolah di Aceh Selatan, bentuk kegiatannya seperti KIP Aceh Selatan *goes to campus* dan *goes to school*, tujuan dari acara ini adalah memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula yang masih awam tentang pemilu dan hak politiknya. KIP Aceh Selatan juga pernah melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan membentuk sebuah komunitas bernama RELAWAN DEMOKRASI, komunitas ini di bentuk untuk membantu tugas KIP Aceh Selatan dalam melakukan Pendidikan politik.”

⁵⁹Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, h. 279-288.



Gambar 4.2 Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasil Kerjasama KIP Aceh Selatan dengan Stasiun Televisi I News



Gambar 4.3 KIP Aceh Selatan Goes To Campus



Gambar 4.4 Foto Pembentukan Relawan Demokrasi oleh KIP Aceh Selatan

Adapun hasil observasi dan dokumentasi dilapangan menunjukkan bahwa peneliti melihat jejaring atau kerjasama KIP Aceh Selatan melakukan kerjasama dengan stasiun TV I NEWS, bentuk kerjasama yang di lakukan adalah menyiarkan

langsung debat calon bupati dan wakil bupati di TV, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menentukan pilihan yang biasa di nilai dari acara debat tersebut. Selain itu, KIP juga mengadakan kerjasama antara sekolah dan kampus yang ada di Aceh Selatan, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula yang belum tahu detail tentang pemilu dan hak politiknya. Disamping itu juga diadakan kerjasama antara masyarakat yang dibentuk dalam sebuah komunitas yang bernama KADER DEMOKRASI dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan tugas KIP Aceh Selatan.⁶⁰

d. Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen didalam perusahaan. Menurut Mulyadi (2008), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam dan tidak terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Azhar juga menjelaskan bahwa prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Ada beberapa karakteristik dari prosedur diantaranya: prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi, prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya semaksimal mungkin, prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana, prosedur juga menunjukkan

⁶⁰ Kegiatan Observasi di KIP Aceh Selatan, tanggal 14 - 20 Oktober 2021

adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab, prosedur juga dapat membantu efisiensi, epektifitas dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana prosedur yang dilakukan KIP Aceh Selatan dalam usaha melaksanakan pendidikan politik di masyarakat? Apakah prosedur yang dilakukan atau dilaksanakan efektif dalam melakukan pendidikan politik ke masyarakat? Apa yang menjadi kendala KIP Aceh Selatan dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan? Lalu Ketua mengatakan:

“Ada beberapa prosedur yang di lakukan KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik, di antaranya adalah melakukan sosialisasi politik ke sekolah- sekolah yang siswanya merupakan DPT (daftar pemilih tetap) baru. Kemudian membentuk komunitas-komunitas yang mempunyai tujuan untuk mensosialisasikan pilkada ke masyarakat contohnya seperti kader demokrasi dan pembentukan PPK (panitia pemilihan kecamatan), memberikan seminar seminar kepada masyarakat yang diisi oleh pemateri-pemateri yang paham dalam bidangnya, ataupun diisi oleh komisioner KIP itu sendiri dan yang terkahir adalah membuat spanduk dan baliho untuk memberikan edukasi atau pemahaman pada masyarakat.”



Gambar 4.5 KIP Aceh Selatan Goes To School



Gambar 4.6 Foto Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diatas menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan KIP yaitu sosialisasi politik ke sekolah-sekolah guna untuk memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang, adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana, dan dapat membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Disamping itu juga melakukan pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dengan tujuan untuk memberikan materi-materi yang sesuai dengan bidangnya.

e. Ketercapaian Tujuan R - R A N I R Y

Pertanyaan terakhir yang diajukan peneliti yaitu ketercapaian tujuan Apa tujuan utama KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik? Apa alasan hal tersebut sehingga menjadi tujuan utama KIP Aceh Selatan? Sejauh ini sudah berapa persentase ketercapaian tujuan KIP Aceh Selatan khususnya dalam bidang pendidikan politik? Lalu Ketua mengatakan: “Tujuan KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan Pendidikan politik adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, memberikan pemahaman tentang hak pemilih serta jenis-jenis pelanggaran pemilu.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, di harapkan pilkada berjalan dengan aman dan damai tanpa sengketa ataupun konflik antar sesama.“

Hal ini senada dengan pendapat Syamsuhadi selaku mantan devisi sosialisasi KIP Aceh Selatan, yang menyatakan bahwa terdapat empat bagian tujuan pemilu antara lain sebagai sarana perwakilan politik dimana masyarakat dapat memilih dan kepentingannya, pemilu sebagai sarana subsesi kepemimpinan secara konstitusional, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi, pemilu sebagai sarana partisipasi masyarakat. Intinya, tujuan pemilu dapat dia rikan untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan maupun wakil rakyat, yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.⁶¹ Dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh KIP Aceh Selatan, maka kaum milenial nantinya akan memiliki pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya berdemokrasi yaitu dengan memilih pada pemilu yang akan diselenggarakan di kemudian hari nanti.

Adapun hasil observasi dan dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa peneliti melihat tujuan KIP Aceh Selatan itu dapat memberikan pemahaman dan partisipasi serta hak-hak dan jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu. Pemilu biasanya diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pemilu juga diselenggarakan untuk memilih para calon anggota legislatif mewakili aspirasi masyarakat.⁶²

Pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Pentingnya bagi masyarakat untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Lazimnya pemilu berasaskan langsung-umum-bebas-rahasia dan berkesamaan.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuhadi tanggal 13 Oktober 2021 via watshap.

⁶² Kegiatan Observasi di KIP Aceh Selatan, tanggal 14-20 Oktober 2021

Sedangkan perilaku penyelenggaraan pemilu yaitu partai politik yang terpimpin dalam wadah komisi pemilihan umum harus jujur dan adil

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	54	54
2	Perempuan	46	46
Jumlah		100	100

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 maka diperoleh data dari 100 responden bahwa yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 54 orang dengan jumlah persentase sebesar 54% dan responden perempuan berjumlah 46 orang dengan jumlah persentase sebesar 46%.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	17-25	48	48
2	26-54	52	52
Jumlah		100	100

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.2 maka diperoleh dari 100 responden bahwa responden yang berusia 17-25 tahun yaitu sebanyak 48 orang dengan persentase 48%, yang berusia 26-54 sebanyak 52 orang dengan persentase 52%.

C. Hasil Penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja KIP Aceh Selatan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Sumber Daya

Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, prinsipnya persepsi adalah makna kepada stimulus indrawi.⁶³ Didalam persepsi terdapat indikator yaitu: sumber daya, sarana dan prasarana, jejaring dan kerjasama, prosedur, dan ketercapaian tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Sumber Daya

Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban					F	Rata-rata	Kategori
		STS	TS	R	S	SS			
Sumber Daya	Komisioner KIP Aceh Selatan menguasai materi ketika melakukan sosialisasi pendidikan politik	4	16	34	40	6	100	3,28	Cukup Baik
	Anggaran yang dimiliki KIP Aceh Selatan direalisasikan dalam bentuk kegiatan pendidikan politik pada masyarakat	1	18	30	39	12	100	3,43	Baik
	Pegawai dan karyawan KIP Aceh Selatan memberikan pelayanan yang memuaskan	5	11	28	43	13	100	3,48	Baik
	KIP Aceh Selatan berperan aktif dalam sosialisasi tentang pentingnya hak menggunakan hak pilih	2	11	19	48	20	100	3,73	Baik
	Rata-rata								3,48

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan persepsi masyarakat terhadap sumber daya pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan sumber daya

⁶³ Jalaluddin Rahmat, (2001). Psikologi komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revolusi, h. 51

banyak masyarakat yang memilih berada pada kategori baik dengan persentase 3,48%. Pada table tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sumber daya mempunyai skor tinggi, hal ini dapat diartikan bahwa persepsi masyarakat terhadap sumber daya berada pada kategori baik karena KIP Aceh Selatan memberikan pelayanan yang memuaskan dan menguasai materi ketika sosialisasi pendidikan politik sehingga sebagian besar masyarakat memilih kategori baik terhadap sumber daya tersebut.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana

Persepsi masyarakat pada sarana dan prasarana sangat berperan aktif pada penggunaan website, media, spanduk guna untuk memberikan edukasi terhadap pendidikan politik dan hak politik, karena semakin lengkap sarana dan prasarana maka masyarakat semakin puas dan mengetahui informasi tentang KIP Aceh Selatan. Persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana

Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban					F	Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4	5			
Sarana dan Prasarana	KIP Aceh Selatan membuat spanduk atau baliho untuk memberikan edukasi terhadap pendidikan politik dan hak politik	2	5	35	47	11	100	3,60	Baik
	KIP Aceh Selatan memiliki website yang membantu saya untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan	4	11	24	44	17	100	3,59	Baik
	Situs website KIP Aceh Selatan sangat update dengan informasi-informasi terbaru	5	16	25	35	19	100	3,47	Baik
	Penggunaan media massa oleh KIP Aceh Selatan seperti instagram, facebook, twitter sangat efektif	5	7	28	38	22	100	3,65	Baik

	dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat									
Rata-rata									3,58	Baik

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarana menunjukkan bahwa semakin besara mayarakat memilih berapa pada kategori baik. Persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarana mempunyai skor tinggi dimana persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarana KIP Aceh Selatan mampu membantu dan mendapatkan informasi tentang pemilu serta KIP juga mempunyai situs website dan media massa seperti facebook, Instagram, twitter yang sangat efektif dalam memberikan pendidikan politik.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Jejaring dan Kerjasama

Jejaring dan kerjasama merupakan salahsatu bentuk interaksi social. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas yang dapat ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Persepsi masyarakat terhadap jejaring dan kerjasama dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Jejaring dan Kerjasama

Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban					F	Rata-rata	Kategori
Jejaring dan Kerjasama	Kerjasama KIP Aceh Selatan dengan stasiun TV telah terjalin dengan baik	4	9	29	39	19	100	3,60	Baik
	Kerjasama KIP Aceh Selatan dan Sekolah Tinggi dan Universitas telah terjalin dengan baik	2	14	25	43	16	100	3,57	Baik
	KIP Aceh Selatan memiliki kerjasama dengan pemilih pemula untuk melakukan pendidikan politik	3	19	19	41	18	100	3,52	Baik
	Rata-rata							3,56	Baik

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap jejaring dan kerjasama berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 3,56%. Adapun bentuk kerjasamanya melalui stasiun TV, sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, dan juga memili kerjasama dengan pemilih pemula untuk melakukan pendidikan politik.

4. Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur

Prosedur adalah suatu rangkaian dari tata kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dimana terlihat adanya urutan tahap demi tahapan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Persepsi masyarakat terhadap prosedur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur

Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban					F	Rata-rata	Kategori
Prosedur	Saya pernah mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan KIP Aceh Selatan	8	12	31	32	17	100	3,38	Cukup Baik
	Sosialisasi tentang pendidikan politik ke sekolah dan merupakan prosedur yang efektif untuk memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula	2	14	16	40	28	100	3,78	Baik
	Pelaksanaa debat calon bupati dan wakil bupati yang di siarkan di INEWS tv adalah metode yang sangat menarik	1	6	15	50	28	100	3,98	Baik
Rata-rata								3,71	Baik

Sumber : Data yang diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas persepsi masyarakat terhadap prosedur menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap prosedur berada kategori baik dengan persentase sebesar 3,71%. Ada beberapa karakteristik dari prosedur diantaranya prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi, prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya semaksimal mungkin, prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan prosedur juga dapat menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. Prosedur yang dilakukan KIP yaitu sosialisasi politik ke sekolah-sekolah untuk memudahkan dan menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang.

5. Persepsi Masyarakat Terhadap Ketercapaian Tujuan

Ketercapaian tujuan dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Persepsi masyarakat terhadap ketercapaian tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketercapaian Tujuan

Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban					F	Rata-rata	Kategori
		5	7	26	36	26			
Ketercapaian Tujuan	Pelaksanaan debat calon bupati dan wakil bupati yang di siarkan di INEWS tv membantu saya dalam menentukan pilihan pada hari pencoblosan	5	7	26	36	26	100	3,71	Baik
	Sosialisasi politik yang di lakukan oleh KIP Aceh Selatan melalui media massa memiliki pengaruh terhadap pengetahuan saya terhadap jenis jenis pelanggaran pemilu	2	9	23	42	24	100	3,77	Baik

	Partisipasi politik yang saya lakukan merupakan dampak dari pendidikan politik yang diberikan KIP Aceh Selatan	3	11	20	46	20	100	3,69	Baik
	Rata-rata							3,72	Baik

Sumber : Data yang dioalh 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap ketercapaian tujuan berada pada kategori baik dengan persentase 3,72%.

6. Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja KIP Aceh Selatan

Berdasarkan data yang telah diteliti dilapangan berdasarkan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja KIP Aceh Selatan

No	Indikator	Rata-rata	Skor
1	Persepsi Masyarakat Terhadap Sumber Daya	3,48	Baik
2	Persepsi Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasaran	3,58	Baik
3	Persepsi Masyarakat Terhadap Jejaring dan Kerjasama	3,56	Baik
4	Persepsi Masyarakat Terhadap Prosedur	3,71	Baik
5	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketercapaian Tujuan	3,72	Baik
Jumlah		3,61	Baik

Sumber : Data yang diolah 2021

Berdasarkan dari semua indikator diatas dapat dijelaskan bahwa total skor berada pada kategori baik dengan jumlah nilai keseluruhan rata-rata sebesar 3,61%.⁶⁴

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu Muhammad Solihin, Tree Setiawan Pamungkas, dan Jhon Roi Tua Purba dalam journal Trias Politika dengan judul “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2014” (2017). Dalam penelitian ini, penulis mendapat kesimpulan Pengetahuan pemilih terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum. pemilih pemula yang tidak mengetahui Bawaslu yakni sebanyak 49,7 persen responden. Sedangkan untuk KPU sebanyak 65,1 persen pemilih pemula mengetahui; Kedua, Tingkat kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum cukup baik 57,2%.⁶⁵

Wahyu Sumunaring Tyas, dalam skripsi “Persepsi pemilih pemula pada iklan kampanye politik (Studi Deskriptif Kuantitatif Persepsi Pemilih Pemula di Kelurahan Karangmalang pada Iklan Kampanye Politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015)” tahun 2015. Penelitian ini mendapat kesimpulan Persepsi pemilih pemula dari Aspek *conviction* pada iklan kampanye politik pemilihan bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2015 adalah dalam tingkat yang tinggi atau dikatakan masih ada sebagian pemilih pemula yang memiliki persepsi yang bisa meyakinkannya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sragen tahun 2015.⁶⁶

⁶⁴ Hasil Angket Terhadap Peran KIP Aceh Selatan Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, Tanggal 14-26 Oktober 2021.

⁶⁵ Tree Setiawan dan Jhon Roi, 2017. *Persepsi Pemilihan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2014*.

⁶⁶ Wahyu Sumunaring Tyas, 2015. “*Persepsi pemilih pemula pada iklan kampanye politik (Studi Deskriptif Kuantitatif Persepsi Pemilih Pemula di Kelurahan Karangmalang pada Iklan Kampanye Politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015)*”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi pemilih terhadap kinerja KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran KIP Aceh Selatan terdapat 5 indikator yaitu: Sumber daya yang memberikan pengaruh dominan terhadap kinerja KIP Aceh Selatan yang diikuti oleh sumber daya tempat, bahan serta karyawan. Sarana dan Prasarana yang dimiliki KIP Aceh Selatan sudah memadai dan sudah terprosedur dikarenakan KIP Aceh Selatan sudah melakukan upaya pembenahan sarana dan prasarana juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jejaring / Kerjasama KIP Aceh Selatan melakukan kerjasama dengan TV I NEWS, *goes to campus*, *goes to school* serta melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan nama KADER DEMOKRASI. Prosedur yang dilakukan yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan seminar kepada masyarakat, serta membuat spanduk untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat. Ketercapaian Tujuan, dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh KIP Aceh Selatan maka kaum milenial mampu memahami dan mengerti akan pentingnya berdemokrasi yaitu dengan memilih pada pemilu nantinya.

2. Persepsi masyarakat terhadap peran KIP sangat mempengaruhi berjalannya proses pemilu yang baik. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja KIP Aceh Selatan berdasarkan sumber daya dengan persentase sebesar 3,48% kategori baik, persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarna sebesar 3,58% kategori baik, persepsi masyarakat terhadap jejaring dan kerjasam sebesar 3,56% kategori baik, persepsi masyarakat terhadap prosedur sebesar 3,71% kategori baik, persepsi masyarakat terhadap ketercapaian tujuan sebesar 3,72%. Dari jumlah keseluruhan indikator dengan rata-rata sebesar 3.61%.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai macam temuan dilapangan, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan persepsi pemilihan terhadap kinerja KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik yakni:

1. KPU Aceh Selatan perlu melakukan upaya memaksimalkan dalam meningkatkan kinerja tahapan proses pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat penyelenggaraan tentang regulasi terutama pada pasangan Calon dalam pelaksanaan pemilihan.
2. Untuk meminimalisir peran masyarakat terhadap kinerja KIP dalam pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu terlebih dahulu melakukan verifikasi berkas pasangan calon secara teliti dan mekanisme kerja para anggota KIP lebih ditingkatkan demi keprofesionalitas, intensitas dan independensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1979.
- Alfian. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. 1978.
- Alfian. (1997). *pemikiran dan perubahan politik indonesia*, Jakarta: PT gramedia
- Arifin, Sunarto, Hadi Cahyono. *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*. 2018.
- Astrid S Susanto. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Bina Cipta. 1999.
- Beni Ahmad Saebani. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Pustaka Setia. 2017
- Bimo Walgjo. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Andi, Yogyakarta. 2005.
- Dannerius Sinaga. *Sosiologi dan Antropologi*. Klaten: PT. Intan Pariwara. 1988.
- Handoyo, Eko. Puji, Lestari. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya. 2017.
- Haryanto. *Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*. Jogjakarta: PolGov. 2018
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. 2009.
- Jalaluddin Rahmat. *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revolusi. 2001.
- Joyce Marcella Laurence. *Arsitektur dan Prilaku Manusia*, PT. Grasindo, Jakarta. 2004.
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Edisi Revisi, Sinar Baru Algensindo, Bandung. 2004.
- Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1989.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Rachmat Kriyantono. *Teknik Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada. 2006
- Ramdlang Naning, *Pendidikan Politik dan Regeneras*. Jakarta, Liberty. 1982

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2002.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1999.

Rega maran,R. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta : PT. RINEKA CIPTA. 2001

Sani, Abdul. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada. 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung:Alfabeta. 2015.

Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:Penerbit Alfabeta. 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung:Alfabeta. 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. 1995

Undang Undang

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Bab II

Journal

Budianto rachmad. *pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2014 di kelurahan simpang pasir kecamatan palaran kota samarinda*. FISIP universitas mulawarman. 2017.

Nazsir. Nasrullah dan Amril Ghaffar Sunny. *Partai Politik, Partisipasi. Politik dan Pendidikan Politik*. Bandung: PPS FISIP UNPAD. 2004.

Philip kottler *Manajemen pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta. 1997.

Skripsi/Thesis

Adeputerahemas, Muhammad. *Peran Komisi Pemilihan umu (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal*. Universitas Negeri Semarang. 2019.

Ani wijayanti. *Persepsi pemilih terhadap pelaksanaan PILBUB 2018 di kecamatan banjar agung Kabupaten Tulang Bawang*. UIN raden intan. 2019

Elisa Justia. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Aceh Selatan Tahun 2018*. UIN ar raniry. 2019

Tendri Ampa. *Persepsi Pemilih Terhadap Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004*. 2010

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-1785707/tiga-peran-masyarakat-sipil-dalam-proses-demokrasi>

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018>

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180630040655-32_310334/partisipasi-pemilih-pilkada-2018-belum-mencapai-targe

<https://www.kpu.go.id>

<https://kab-acehselatan.kpu.go.id/>



Lampiran 1. SK Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 414/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 27 Januari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Menunjuk Saudara
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D. | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Soc | Sebagai pembimbing kedua |
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Razul Ikrama
- NIM : 170801054
- Program Studi : Ilmu Politik
- Judul : Persepsi Pemilih Terhadap Kinerja KIP Aceh Selatan Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Kasus Pilkada Aceh Selatan 2018)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini bertaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 17 Februari 2021
 An. Rektor
 Dekan



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2308/Un.08/FISIR.I/PP.00.9/10/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada KIP Aceh Selatan
2. Kepada masyarakat Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAZIUL IKRAMA / 170801054
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Politik
 Alamat sekarang : Desa Alai, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KIP ACEH SELATAN DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK (STUDI KASUS PILKADA ACEH SELATAN 2018)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Oktober 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Maret 2022

A R - R A N I R Y

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3. Kuesioner

KUISIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat :

Perkenalkan saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Program Studi Ilmu Politik yang sedang mengadakan penelitian tentang **“Persepsi pemilih terhadap peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik (studi kasus PILKADA Aceh Selatan tahun 2018”**. Kali ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuisisioner. Berikut kuisisioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak akan berpengaruh pada diri Bapak/Ibu/Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Raziul ikrama

170801054

A. DATA RESPONDEN :

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Saudara mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia).

Lingkari untuk jawaban pilihan saudara.

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Umur :
- d. Asal kecamatan :

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan.

Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternative jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu:

Sangat Setuju	(SS)	= 5
Setuju	(S)	= 4
Netral	(N)	= 3
Tidak Setuju	(TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju	(STS)	= 1

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.

PERTANYAAN PENELITIAN A R - R A N I R Y

NO	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	a. Indikator sumber daya					
1.	Komisioner KIP Aceh Selatan menguasai materi ketika melakukan sosialisasi pendidikan politik	1	2	3	4	5
2.	Anggaran yang di miliki KIP Aceh Selatan direalisasikan dalam bentuk	1	2	3	4	5

	kegiatan pendidikan politik pada masyarakat					
3	Pegawai dan karyawan KIP Aceh Selatan memberikan pelayanan yang memuaskan	1	2	3	4	5
4	KIP Aceh Selatan berperan aktif dalam sosialisasi tentang pentingnya hak menggunakan hak pilih	1	2	3	4	5
<i>b. Indikator sarana dan prasarana</i>						
1.	KIP Aceh Selatan membuat spanduk atau baliho untuk memberikan edukasi terhadap pendidikan politik dan hak politik	1	2	3	4	5
2.	KIP Aceh Selatan memiliki website yang membantu saya untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan	1	2	3	4	5
3	Situs website KIP Aceh Selatan sangat update dengan informasi-informasi terbaru	1	2	3	4	5
4	Penggunaan media massa oleh KIP Aceh Selatan seperti instagram, facebook, twitter sangat efektif dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat	1	2	3	4	5
<i>c. Indikator jejaring dan kerjasama</i>						
1.	Kerjasama KIP Aceh Selatan dengan stasiun TV telah terjalin dengan baik	1	2	3	4	5
2.	Kerjasama KIP Aceh Selatan dan Sekolah Tinggi dan Universitas telah terjalin dengan baik	1	2	3	4	5

3	KIP Aceh Selatan memiliki kerjasama dengan pemilih pemula untuk melakukan pendidikan politik	1	2	3	4	5
d. Indikator prosedur						
1.	Saya pernah mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan KIP Aceh Selatan	1	2	3	4	5
2.	Sosialisasi tentang pendidikan politik ke sekolah dan merupakan prosedur yang efektif untuk memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula	1	2	3	4	5
3	Pelaksanaa debat calon bupati dan wakil bupati yang di siarkan di INEWS tv adalah metode yang sangat menarik	1	2	3	4	5
e. Indikator ketercapaian tujuan						
1	Pelaksanaa debat calon bupati dan wakil bupati yang di siarkan di INEWS tv membantu saya dalam menentukan pilihan pada hari pencoblosan	1	2	3	4	5
3	Sosialisasi politik yang di lakukan oleh KIP Aceh Selatan melalui media massa memiliki pengaruh terhadap pengetahuan saya terhadap jenis jenis pelanggaran pemilu	1	2	3	4	5
4	Partisipasi politik yang saya lakukan merupakan dampak dari pendidikan politik yang diberikan KIP Aceh Selatan	1	2	3	4	5

Lampiran 4. Pertanyaan untuk KIP Aceh Selatan

PERTANYAAN UNTUK KIP ACEH SELATAN**1. INDIKATOR SEMBER DAYA**

- a. Sumber daya apa yang dimiliki KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas, khususnya melakukan pendidikan politik titik ?
- b. Apakah sumber daya tersebut cukup untuk memaksimalkan peran KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik ?
- c. Sejauh ini apa yang telah dilakukan pihak KIP Aceh Selatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki contohnya pada pegawai pegawai kantor KIP Aceh Selatan ?

2. INDIKATOR KETERCAPAIAN TUJUAN

- a. Apa tujuan utama KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan pendidikan politik ?
- b. Apa alasan hal tersebut sehingga menjadi tujuan utama KIP Aceh Selatan ?
- c. Sejauh ini sudah Berapa persentase ketercapaian tujuan KIP Aceh Selatan khususnya dalam bidang pendidikan politik ?

3. INDIKATOR SARANA DAN PRASARANA

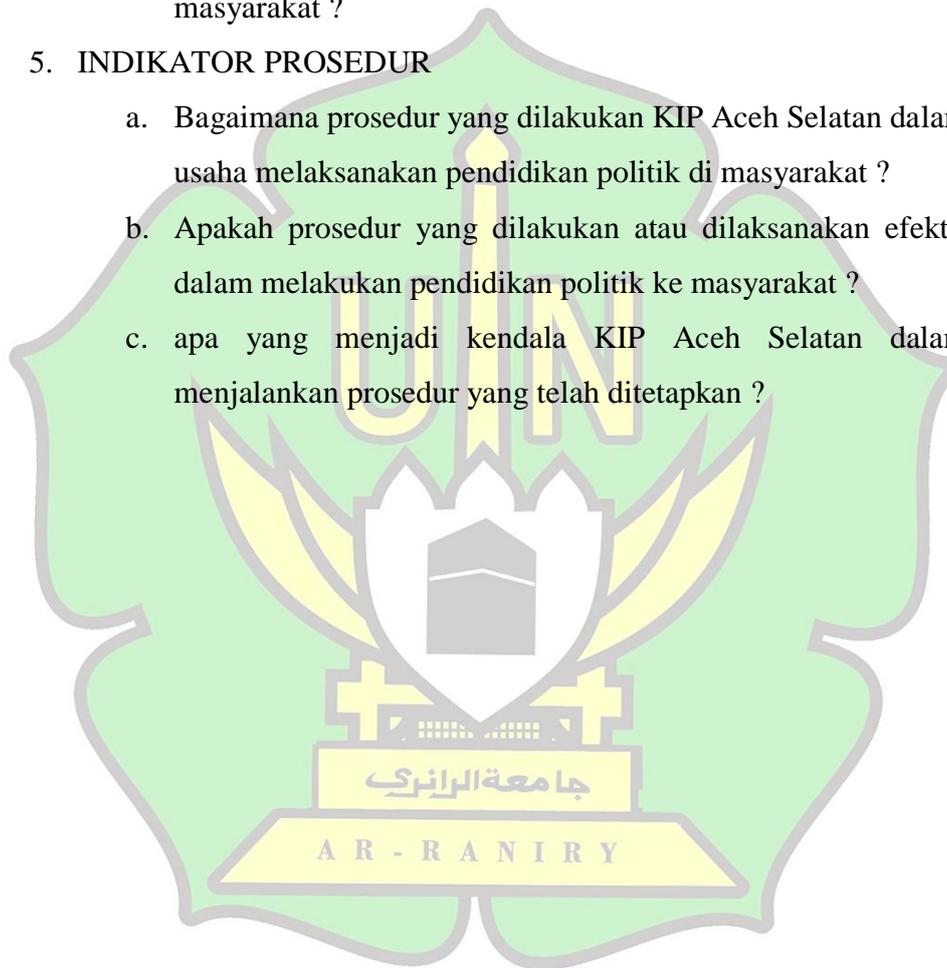
- a. Sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki KIP Aceh Selatan selama ini untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik ?
- b. Apakah kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki KIP Aceh Selatan mampu mendukung tugas KIP khususnya dalam pelaksanaan tugas pendidikan politik ?
- c. Dengan sarana dan prasarana yang ada apa yang telah dilakukan pihak KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik politik ?

4. INDIKATOR JEJARING DAN KERJA SAMA

- a. Apakah pihak kepada Selatan mempunyai jejaring dan kerjasama khususnya dalam hal pendidikan politik ?
- b. Jejaring dan kerjasama seperti apa yang telah di lakukan KIP Aceh Selatan dalam melakanakan pendidikan politik ?
- c. Apakah jejaring dan kerjasama yang dilakukan KIP Aceh Selatan memiliki dampak terhadap pendidikan politik masyarakat ?

5. INDIKATOR PROSEDUR

- a. Bagaimana prosedur yang dilakukan KIP Aceh Selatan dalam usaha melaksanakan pendidikan politik di masyarakat ?
- b. Apakah prosedur yang dilakukan atau dilaksanakan efektif dalam melakukan pendidikan politik ke masyarakat ?
- c. apa yang menjadi kendala KIP Aceh Selatan dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan ?



Lampiran 5. Dokumentasi



Foto bersama ketua KIP Aceh Selatan



Foto wawancara dengan ketua KIP Aceh Selatan



Foto penyerahan Surat Izin Penelitian kepada perwakilan kepala desa



Foto dengan perwakilan laki-laki di Kecamatan Tapaktuan



Foto dengan perwakilan laki-laki di Kecamatan Bakongan



Foto dengan perwakilan laki-laki di Kecamatan Kluet Timur



Foto dengan perwakilan laki-laki di Kecamatan Kluet Utara



Foto dengan perwakilan laki-laki di Kecamatan Pasieraja



Foto dengan perwakilan laki-laki di Kecamatan Kluet Selatan



Foto dengan perwakilan perempuan di Kecamatan Kluet Selatan



Foto dengan perwakilan perempuan di Kecamatan Bakongan



Foto dengan perwakilan perempuan di Kecamatan Kluet Timur